

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN DAN LANGKAH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM MENANGANI
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ANA RUBIYANI

NIM : 20301800120

Konsentrasi Studi : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN DAN LANGKAH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM MENANGANI
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANA RUBIYANI

NIM : 20301800120

Konsentrasi Studi : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2020

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN DAN LANGKAH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM MENANGANI
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL.

TESIS

Oleh:

ANA RUBIYANI

NIM : 20301800120
Konsentrasi Studi : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

Disetujui oleh;

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N, M.Hum

NIDN : 06-1702-6801

Pembimbing II

Tanggal,

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,

Kesua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.IL., M.Hum

NIDN. 210-389-018

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN DAN LANGKAH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM MENANGANI
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL

TESIS

Oleh:

ANA RUBIYANI

NIM : 20301800120
Konsentrasi Studi : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

Telah Diperlakukan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 10 September 2020
Dan Dinyatakan

Tim Pengaji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H., M.Hum

NIDN: 210-389-018

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., S.P., M.Hum

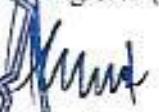
NIDN: 06-1702-6801

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN: 06-0612-6501



Mengetahui,
Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H., M.Hum

NIDN. 210-389-018

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANA RUBIYANI

NIM : 20301800120

Konsentrasi Studi : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN DAN LANGKAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL DALAM MENANGANI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL**" adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 September 2020

Yang membuat pernyataan



Nim. 20301800120

ABSTRAK

Salah satu tujuan *landreform* adalah untuk melakukan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, yaitu dengan merombak struktur pertanahan guna merealisir keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibuatlah program-program *landreform* antara lain pembatasan luas maksimum penguasaan tanah dan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan pengganti Undang – Undang, dengan spesifikasi deskriptif analitis data yang dikumpulkan dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu Ketentuan mengenai pembatasan tanah disebutkan bahwa permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2000 m². (2) Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap kepemilikan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimal di Kabupaten Kendal yaitu Kantor Pertanahan melakukan pengawasan kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Hal ini salah satunya disebabkan ketentuan Pasal 3 UU PLTP meletakan kewajiban kepada pemilik atau penguasa tanah untuk melaporkan atas kelebihan dari batas maksimum tanah pertanian kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 3) Langkah Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan Peraturan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sehingga berjalan efektif di Kabupaten Kendal yaitu perlunya konsep terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah, mengingat berbagai masalah yang kerap timbul seperti dalam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu rumitnya prosedur pendaftaran hak atas tanah, adanya pungutan-pungutan tambahan dan biaya yang relatif mahal, terjadinya sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penerbitan sertifikat oleh pihak yang tidak berhak.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Pembatasan Luas Tanah Pertanian

ABSTRACT

One of the objectives of land reform is to provide a fair distribution of the livelihoods of the peasants in the form of land, with the aim of equitable distribution of results, namely by overhauling the land structure in order to realize social justice. To achieve this, land reform programs were made, including limiting the maximum area of land tenure and determining the minimum area of ownership of agricultural land, accompanied by prohibitions on carrying out actions that resulted in the division of ownership of agricultural lands into parts that were too small. The purpose of this thesis research is to study and analyze the arrangement of ownership of agricultural land rights that exceeds the maximum limit based on the Laws in Lieu of Law Number 56 (Prp) of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas.

The method used is juridical empirical, which examines the implementation of regulations in lieu of laws, with descriptive analytical specifications of data collected with primary data from field research and secondary data from literature studies.

The results of this research are: (1) Arrangement of ownership of agricultural land rights that exceeds the maximum limit based on Law Number 56 (Prp) of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas, namely the provisions regarding land restrictions, it is stated that the application for ownership rights as referred to in article 4 paragraph 1 Law Number 56 (Prp) of 1960 is limited to land with a maximum area of 2000 m². (2) Actions taken by the Land Office against ownership of agricultural land rights that exceed the maximum limit in Kendal Regency, namely the Land Office supervises ownership or control of agricultural land that exceeds the maximum limit. This is partly because the provisions of Article 3 of the PLTP Law place an obligation on the land owner or authority to report the excess of the maximum limit of agricultural land to the Head of the Regency / City Land Office. 3) Steps of the Land Office in implementing Law Number 56 (Prp) of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas so that they are effective in Kendal Regency, namely the need for a concept of supervision and control over control of land rights, given the various problems that often arise such as in activities land registration, namely the complexity of the procedure for registering land rights, the existence of additional levies and relatively expensive fees, the occurrence of multiple certificates, land grabbing followed by the issuance of certificates by unauthorized parties.

Keywords: *Land Rights, Limitation of Agricultural Land Area*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa - doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : “**Analisis Hukum Terhadap Tindakan Dan Langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Dalam Menangani Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Yang Melebihi Batas Maksimal**” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus sebagai pembimbing;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rondhiyah DI, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;

6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuananya selama ini;
8. Teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya yang telah banyak membantu sejak awal hingga selesainya Tesis ini
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 September 2020

Penulis,



Nim. 20301800120